

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEMBANGKITKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

**Oleh
Dinda Ariandini**

Munculnya Covid-19 dan terjadinya pandemi membuat perkembangan UMKM yang pesat mengalami penurunan, sehingga berdampak langsung pada pendapatan ekonomi UMKM. Pemerintah memberikan bantuan UMKM melalui Kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program PEN. Fakta lapangan tercatat pada tahun 2019 hingga 2020 perkembangan usaha pada kategori mikro di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan sebesar 3.404. Permasalahan penelitian (1) Bagaimanakah kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam membangkitkan UMKM melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional? (2) Apa sajakah faktor penghambat kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam membangkitkan UMKM melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data meliputi seleksi data, kualifikasi data, penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam membangkitkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui PEN telah berjalan dengan optimal dapat dilihat peningkatan usaha pada kategori mikro mencapai 2.502 yaitu dengan adanya kebijakan memberikan fasilitas dalam hal perzinan, memberikan fasilitas untuk mendapatkan bantuan modal Bantuan Produktif Usaha Mikro, menyelenggarakan akses pasar serta saran pemasaran di masa pandemi. (2) Faktor penghambat Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam membangkitkan UMKM melalui Program PEN yaitu adanya kebijakan PPKM yang membuat Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung tidak dapat bertemu langsung dengan masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai program BPUM dan Kurangnya jumlah sumber daya manusia dalam merekap dan menyeleksi data calon penerima BPUM.

Kata Kunci : Kebijakan, UMKM, Program PEN, BPUM

ABSTRACT

BANDAR LAMPUNG GOVERNMENT POLICIES IN GENERATING MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES THROUGH THE NATIONAL ECONOMIC RECOVERY PROGRAM

***By
DINDA ARIANDINI***

The emergence of Covid-19 and the occurrence of a pandemic caused the rapid development of UMKM to experience a decline, so that it had a direct impact on the economic income of UMKM. The government provides UMKM assistance through the National Economic Recovery Program Policy based on Government Regulation No 43 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation No 23 of 2020 concerning Implementation of the PEN Program. Field facts noted that from 2019 to 2020 business development in the micro category in Bandar Lampung City has decreased by 3,404. Research problems (1) What is the policy of the Bandar Lampung City government in reviving UMKM through the National Economic Recovery Program? (2) What are the inhibiting factors for the Bandar Lampung City government's policy in reviving UMKM through the National Economic Recovery Program?

This study uses a normative and empirical juridical approach. Data collection is done by literature study and field study. Data processing includes data selection, data qualification, data compilation. Data analysis using qualitative descriptive analysis.

The results of this study indicate that (1) the Bandar Lampung City government's policy in generating Micro, Small and Medium Enterprises through PEN has been running optimally, it can be seen that the increase in businesses in the micro category reached 2.502, namely with the policy of providing facilities in terms of licensing, providing facilities to obtain assistance capital for Productive Assistance for Micro Enterprises, providing market access and marketing advice during a pandemic. (2) The inhibiting factors for the Bandar Lampung City Government Policy in generating UMKM through the PEN Program are the PPKM policy which makes the Bandar Lampung City Cooperative and UKM Office unable to meet directly with the community in carrying out socialization regarding the BPUM program and the lack of human resources in recording and selecting data on prospective BPUM recipients.

Keywords: Policy, UMKM, PEN Program, BPUM